

Peran Program Repatriasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Community Learning Center (CLC) Sabah Malaysia

Lia Anggraeni dan Nurtanio Agus Purwanto

Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Email : lia0049fipp.2022@student.uny.ac.id

Abstract: The study aims to examine the role of repatriation programs in improving the quality of education in *Community Learning Centers* (CLCs) in Sabah, Malaysia. The main focus of the research is to investigate the aspects of education quality in CLCs, identify obstacles to improving the quality of education in CLCs, understand the implementation of repatriation, and identify the role of repatriation programs. This research is expected to provide strategic recommendations to improve the quality of education in CLCs in Sabah, Malaysia. This research was descriptive research with a qualitative approach. The location of this research was CLC in the Sabah, Malaysia, region. The subjects in this study were the principal of the Indonesian School of Kota Kinabalu (SIKK), CLC teachers, and CLC alumni. Data collection in this study was carried out by technical observation, documentation, and interviews. The validity of the data was checked using a triangulation technique. Meanwhile, data analysis used qualitative data analysis techniques (Miles and Huberman), with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The study shows that each CLC seeks to meet the eight national education standards set by the Indonesian government. Because the SNP has not been implemented optimally, SIKK as the parent school of CLC carries out internal standardization through monitoring and evaluation. Obstacles to improve the quality of CLC education are mostly in terms of administration. Besides that, each CLC has different challenges and obstacles. The repatriation program is one of the efforts to improve quality in the form of repatriation of students to continue their education, which is divided into the ADEM repatriation pathway, which is fully financed by the government, and the Foundation repatriation pathway, which the Foundation or partner schools finance. The role of the repatriation program in improving the quality of education in CLC, Sabah, Malaysia, includes increasing students' motivation to learn, increasing parents' awareness of education, improving the quality of CLC graduates, and improving the quality of the educational service process at CLC.

Keywords: CLC; quality of education; repatriation

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran program repatriasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Community Learning Center (CLC) di Sabah, Malaysia. Fokus utama penelitian adalah mengetahui aspek mutu pendidikan yang ada di CLC, mengidentifikasi hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan di CLC, mengetahui pelaksanaan repatriasi serta mengidentifikasi peran program repatriasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah CLC di wilayah, Sabah, Malaysia. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Guru CLC dan Alumni CLC. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan diantaranya setiap CLC berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dikarenakan SNP tidak diterapkan secara maksimal, SIKK sebagai sekolah induk bagi CLC melakukan standarisasi internal melalui monitoring dan evaluasi. Hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan CLC sebagian besar dari segi administrasi, selain itu masing-masing CLC memiliki tantangan dan kendala yang berbeda. Program repatriasi menjadi salah satu upaya dalam peningkatan mutu dengan bentuk pemulangan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang terbagi atas jalur repatriasi ADEM dan jalur repatriasi Yayasan. Peran program repatriasi dalam peningkatan mutu pendidikan di CLC, Sabah, Malaysia diantaranya meliputi meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kesadaran orang tua tentang pendidikan, meningkatkan mutu lulusan CLC dan meningkatkan mutu proses layanan pendidikan di CLC.

Kata kunci: CLC; mutu pendidikan; Repatriasi

Akses terhadap pendidikan merupakan hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan yang menyeluruh dan bermutu. Melalui pencarian ilmu pengetahuan, generasi muda diharapkan akan siap menghadapi kompleksitas masa depan. Pelaksanaan proses pendidikan melampaui batas negara, bahkan merambah ke ranah internasional. Sejumlah besar anak usia sekolah, karena berbagai keadaan, ikut serta bersama orang tua mereka bermigrasi ke luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Malaysia, khususnya Sabah, menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja migran Indonesia yang mencari peluang kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dollah et al., 2024), yang menyatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir permintaan tenaga kerja murah telah meningkat secara signifikan, sehingga menyebabkan negara bagian Sabah menerima sejumlah besar pekerja migran dari Indonesia. Indonesia dengan populasi penduduk yang cukup tinggi, mampu menyediakan kebutuhan tenaga kerja tersebut. Sabah menjadi tujuan utama bagi pekerja migran dari Indonesia baik yang masuk melalui jalur legal maupun jalur ilegal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Peters et al., 2022) yang menyatakan bahwa Sabah menjadi tujuan favorit bagi pekerja migran karena letak geografis yang berdekatan dengan Indonesia dan Filipina, peluang ekonomi untuk pekerjaan berketerampilan rendah, afinitas sejarah dan budaya serta keberadaan keluarga dan kerabat. Hal ini sejalan dengan Temuan statistik dari Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode Agustus 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dikategorikan berdasarkan negara.

Pada bulan Agustus 2023, penempatan Pekerja Migran Indonesia terbanyak adalah Hong Kong bergerak naik ke posisi pertama dengan total 8.164 penempatan, mengalami peningkatan dari

bulan Juli sejumlah 826 penempatan. Kemudian diikuti oleh Taiwan yang turun ke posisi kedua dengan 7.972 penempatan, yang juga mengalami peningkatan dari bulan Juli sejumlah 195 penempatan. Sementara, posisi ketiga masih negara Malaysia dengan jumlah penempatan sebanyak 7.502, dengan peningkatan dari bulan Juli sebanyak 726 penempatan.

Sebelumnya humas BP2MI menyatakan

Menurut data, banyak PMI non prosedural pergi ke Sabah melalui pulau Sebatik, kabupaten Nunukan. Hal ini dimungkinkan karena banyak jalur ke Sabah yang tanpa penjagaan serta dipermudah lagi dengan bantuan para pihak tertentu. Diperkirakan satu juta PMI beserta keluarganya dewasa ini berada di Sabah.

Sebagian besar pekerja migran Indonesia berasal dari daerah timur seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hal ini dikarenakan letak wilayah geografis yang dapat memungkinkan kemudahan perjalanan yaitu wilayah laut. Kampung-kampung dengan nama suku keindonesiaan dapat dijumpai. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Allerton, 2018) yang menyatakan bahwa sebagian besar pekerja migran Indonesia berasal dari Bugis Muslim, Tana Toraja Protestan dan migran Katolik dari wilayah Flores Timur, yang dikenal sebagai orang Timor. Keberadaan PMI yang tidak hanya sendiri, dalam maksud membawa serta keluarga dan dengan kondisi *undocumented* atau tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk izin tinggal, menjadikan kendala bagi anak PMI untuk bersekolah. Pemerintah Indonesia, sejak tahun 2011 melalui pertemuan *government to government*, yaitu pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia sudah bersepakat memberikan akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Anak-anak usia sekolah yang ikut bersama orang tuanya merantau ke Sabah-Malaysia pada awalnya terkendala akan pemenuhan hak pendidikan. Namun kemudian, beberapa tahun perusahaan sawit mulai mengambil peran terhadap pemberian akses layanan pendidikan bagi anak pekerja di perkebunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Loganathan et al., 2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kebijakan di Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Timur seperti Sabah, bagi pekerja migran yang dipekerjakan di Perkebunan dimana sebagian besar berjenis kelamin laki-laki diperbolehkan membawa pasangan dan anak-anak. Dengan persyaratan pihak perkebunan dapat memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dan mencegah menjadi pekerja sesuai dengan persyaratan sertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2020) yang menyatakan bahwa Malaysia merupakan salah satu eksportir utama minyak kelapa sawit. Tanpa industri kelapa sawit, Malaysia akan kehilangan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat mempengaruhi perekonomian nasional.

Hasil kesepakatan *government to government* antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia menjadi rujukan pendirian *Community Learning Center* (CLC) yang tersebar di wilayah Sabah. Layanan Pendidikan *Community Learning Center* (CLC) tersebar di seluruh Sabah dan Sarawak, Malaysia. Penyelenggaraan CLC dikoordinasikan oleh Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang bertindak sebagai lembaga induk, bersama tiga kantor perwakilan Republik Indonesia yang berlokasi di Sabah dan Sarawak. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu (Sabah), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching (Sarawak), dan Konsulat Republik Indonesia di Tawau (Sabah). Layanan pendidikan yang disediakan oleh CLC mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). CLC didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah

dan Sarawak, Malaysia, yang tidak dapat mengakses SIKK sebagai sekolah dasar mereka karena jarak geografis dan terbatasnya jumlah siswa. Akibatnya, CLC beralih dari SIKK menjadi kelas jarak jauh. Jika mempertimbangkan konteks geografis CLC, CLC dikategorikan menjadi dua segmen yang berbeda, CLC Ladang dan CLC Non Ladang. CLC Ladang berfungsi sebagai entitas penting dalam ranah perkebunan kelapa sawit yang luas. Pelaksanaan CLC Ladang didukung oleh bantuan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, CLC Non Ladang berfungsi secara independen dari perkebunan kelapa sawit yang luas, meliputi berbagai bangunan seperti rumah toko, bangunan gereja, dan area perumahan yang diprakarsai oleh para pemimpin masyarakat atau individu yang berdedikasi untuk pendidikan anak-anak Indonesia di sekitarnya. Saat ini, sebagian besar CLC berfungsi di dalam perkebunan kelapa sawit. CLC Non Ladang, yang berafiliasi dengan gereja, muncul dari komitmen jemaat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja migran. Selain itu bentuk pelayanan yang diberikan hanya sebatas kemampuan dasar yaitu membaca, menulis dan berhitung. Keterlibatan pemerintah Indonesia melalui CLC telah mendorong gereja untuk menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak PMI. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Schulz, 2017) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi Kristen dari berbagai denominasi telah memulai pelayanan bagi komunitas anak-anak PMI, yang didukung oleh gereja Lutheran yang didirikan di Sabah.

SIKK menjadi induk atau pusat pengelolaan seperti administrasi, keuangan dan hal lainnya bagi CLC yang berada di wilayah Sabah dan Sarawak. Kepala Sekolah hanya satu yaitu kepala sekolah SIKK yang menjadi penanggung jawab bagi penyelenggaraan pendidikan di CLC. SIKK memiliki layanan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SMA TJJ (Terbuka Jarak Jauh). Berdasarkan data Dapodik per Januari 2024 terlampir dalam Laporan Divisi CLC SIKK bulan Maret tahun 2024, jumlah peserta didik jenjang PAUD sebanyak 58, jumlah peserta didik jenjang SD sebanyak 375, jumlah peserta didik jenjang SMP sebanyak 201, jumlah peserta didik jenjang SMA dan SMA TJJ sebanyak 475 dan jumlah peserta didik jenjang SMK sebanyak 191.

Berdasarkan data Dapodik CLC di wilayah Sabah per Januari 2024. Untuk jenjang SD jumlah peserta didik sebanyak 13.247 sedangkan jumlah peserta didik jenjang SMP sebanyak 5025. Peserta didik tersebut tersebar di 238 titik lokasi di wilayah Sabah. Selain pendidikan formal, di CLC melayani layanan pendidikan non formal khususnya pendidikan kesetaraan PKBM KJRI Kota Kinabalu baik Paket A, Paket B dan Paket C. Jumlah peserta didik keseluruhan sebanyak 3.580.

Setiap tahunnya kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SIKK baik jenjang SMA dan SMK hanya sekitar 150 an, sedangkan potensi lulusan siswa kelas IX baik dari SIKK dan CLC sekitar 1300-1500. Oleh karena itu, karena adanya keterbatasan kuota penerimaan di SIKK, sebagian dari lulusan siswa kelas IX melanjutkan pendidikan melalui program repatriasi. Sesuai kesepakatan *government to government* terbatas layanan pendidikan yang ada di CLC hanya melayani jenjang SD dan SMP, tidak ada jenjang SMA maupun SMK di CLC. Kondisi tersebut, menjadi dorongan utama pelaksanaan repatriasi pendidikan bagi anak PMI yang sudah lulus di CLC jenjang SMP. Siswa yang telah menyelesaikan sekolah

menengah pertama harus kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Repatriasi menjadi salah satu alternatif upaya keberlanjutan pendidikan bagi anak PMI. Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi penerima repatriasi. Hal ini dikarenakan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Warsono et al., 2018) yang menyatakan bahwa khususnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara memberikan layanan pendidikan bagi anak PMI. Beberapa bantuan dari perusahaan Pertamina, Yayasan Dompot Dhuafa dan relawan bersedia menjadi tenaga pengajar untuk keberlangsung sekolah tersebut.

Peserta didik yang sudah lulus CLC jenjang SMP diwajibkan untuk menuntaskan keberlanjutan pendidikan. Apabila tidak melanjutkan pendidikan, peluang permasalahan sosial yang dilakukan oleh anak PMI meningkat, seperti menjadi pekerja yang belum mencapai usia kerja sehingga menjadi pekerja ilegal. Selain itu permasalahan sosial yang lain, yang dapat muncul terutama bagi peserta didik perempuan akan menjadi objek pernikahan bagi orang tua.

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak PMI sudah berjalan selama 12 tahun. Pendirian CLC tersebar sebagian besar di ladang sawit dimana banyak PMI yang bekerja di sektor ladang. Selain itu, sebagian kecil tersebar di kota atau non ladang. Teknis penyelenggaraan pendidikan tetap merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sehingga standar pelaksanaan pendidikan tetap sama dengan yang ada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam proses penyelenggaraan pendidikan CLC di Sabah berkolaborasi dengan orang tua yang merupakan PMI dan perusahaan sawit. Hal ini dikarenakan pendirian CLC di Sabah harus tetap memenuhi aturan menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (JPNS).

Selama kurang lebih 12 tahun proses pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri sudah terlaksana. Saat ini, mutu pendidikan di CLC menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait. SIKK sebagai sekolah induk menjadi pusat pengelolaah dalam penyelenggaraan CLC melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahun dalam rangka pemantauan penyelenggaraan pendidikan di CLC. Pelaksanaan akreditasi hanya dilakukan di sekolah induk yaitu SIKK sedangkan di CLC tidak. Pemantauan penyelenggaraan pendidikan CLC tidak hanya dilakukan oleh SIKK melainkan juga oleh Kementerian terkait yang Kemendikbudristek dan beberapa kali dilakukan oleh BPK terkait penggunaan anggaran di CLC. Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti tentang “Peran Program Repatriasi terhadap Mutu Pendidikan *Community Learning Center* (CLC) di Sabah, Malaysia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui peran program repatriasi dalam peningkatan mutu pendidikan *Community Learning Center* (CLC) di Sabah, Malaysia. Penelitian ini mengambil lokasi di CLC wilayah Sabah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian tentang repatriasi pendidikan khususnya bagi anak PMI sudah berjalan sejak tahun 2013. Durasi penyelenggaraan repatriasi bagi anak PMI khususnya di wilayah Sabah sudah meluluskan beberapa lulusan yang memberikan dampak bagi penyelenggaraan layanan pendidikan

di CLC. Selain itu, CLC sudah memberikan layanan pendidikan sejak tahun 2011. Waktu penelitian peran program repatriasi dalam peningkatan mutu pendidikan di *Community Learning Center* di Sabah, Malaysia dilakukan pada bulan April -November tahun 2024.

Penelitian ini mengambil data dari siswa CLC di Sabah, Malaysia, dengan fokus khusus pada siswa di tingkat sekolah menengah pertama. Program repatriasi dirancang untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas, yang meliputi SMA, SMK, dan MA. Selain peserta didik sebagai peserta atau subjek utama repatriasi, sumber data primer berikutnya adalah guru di CLC dan Kepala SIKK. Alasan pemilihan kepala SIKK sebagai sumber data primer dikarenakan SIKK merupakan induk bagi CLC seluruh Sabah, seluruh kebijakan yang dilakukan di CLC dilakukan dan atas sepengetahuan SIKK. Pemilihan sumber data primer guru berdasarkan titik lokasi CLC yang tersebar di beberapa wilayah di Sabah. Penulis melakukan pengumpulan data kepada beberapa guru yang tidak terpusat di satu titik lokasi melainkan di beberapa titik lokasi yang tersebar di Sabah mulai dari wilayah timur yaitu Kalabakan, Balung, Kinabatangan-Lahad Datu, sampai dengan wilayah barat yaitu Pantai Barat, Kota Kinabalu.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gambar yang menggambarkan pelaksanaan program repatriasi beserta penyediaan layanan pendidikan di CLC.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memastikan validitas datanya melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Proses ini memerlukan pemilihan data yang dianggap baru, signifikan, dan menarik secara cermat, serta kategorisasi data ini berdasarkan atribut seperti bentuk, warna, sifat, dan jenis. Lebih jauh, proses ini mencakup konstruksi hubungan di antara kategori-kategori ini dan identifikasi tema penelitian menyeluruh. (Sugiyono, 2020: 487).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi bersamaan dengan pengumpulan data dan setelahnya, setelah selesainya fase pengumpulan data dalam jangka waktu yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis model kualitatif interaktif, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman (1984). Pendekatan ini mencakup empat komponen utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Karakteristik *Community Learning Center* (CLC)

Community Learning Center (CLC) berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan inisiatif pendidikan di luar negeri, khususnya di wilayah Sabah, Malaysia. CLC berfungsi sebagai sumber daya pendidikan bagi anak-anak PMI, khususnya di Sabah, Malaysia, yang memenuhi kebutuhan mereka dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pemerintah Malaysia menetapkan peraturan yang menetapkan bahwa siswa dalam program CLC harus berusia antara 6 dan 15 tahun.

Siswa harus terdiri dari anak-anak buruh tani Indonesia yang bekerja di negara bagian Sabah, khususnya mereka yang berusia antara enam dan lima belas tahun. [Pasal 5.1 Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah].

Pemerintah Indonesia secara resmi meresmikan CLC pada tanggal 22 Oktober 2010. Di samping secara legalitas dari Pemerintah Malaysia pada tanggal 25 November 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan peraturan untuk pendirian CLC melalui Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah.

Pada perkembangannya, CLC tidak hanya tumbuh di wilayah ladang melainkan di pusat keramaian PMI tinggal seperti di perkotaan. Hal ini dikarenakan sektor pekerjaan PMI di Sabah, tidak hanya bergerak di sektor ladang sawit melainkan juga di sektor rumah tangga, jasa restoran, dan jasa kontrak bangunan.

Program Repatriasi

Peraturan pemerintah Malaysia menyatakan bahwa peserta didik CLC berusia 6-15 tahun, sehingga tidak ada CLC yang melayani sampai jenjang SMA/SMK/ sederajat. Peserta didik CLC yang sudah menyelesaikan tingkatan SMP memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan di SMA/SMK SIKK. Namun, SIKK sebagai sekolah induk memiliki keterbatasan kuota rombongan belajar dalam PPDB setiap tahunnya. Ditambah lagi potensi jumlah lulusan peserta didik kelas IX CLC berada di kisaran 1300. Sehingga tidak mungkin SIKK mampu menampung seluruh peserta didik CLC sementara SIKK sendiri memiliki peserta didik.

Pemerintah Malaysia melarang adanya pekerja di bawah umur sehingga anak PMI yang sudah menyelesaikan CLC di jenjang SMP harus kembali ke Indonesia. Repatriasi menjadi salah satu program berkelanjutan yang diberikan bagi anak PMI. Repatriasi merupakan pemulangan kembali warga negara dari suatu negara ke negara asalnya. Anak PMI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/ sederajat melalui jalur repatriasi.

Aspek Mutu Pendidikan di CLC dilihat dari SNP

Penulis mengambil sudut pandang dari delapan SNP yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan mencakup berbagai unsur, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. **bt**atusnya sebagai lulusan. Temuan penelitian mengenai unsur-unsur standar kompetensi lulusan yang digunakan dalam CLC menunjukkan bahwa standar-standar ini selaras dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, yang mencakup integrasi yang kohesif dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sebagaimana diartikulasikan oleh salah satu guru CLC dengan cara berikut.

“Standar kompetensi lulusan kami. Kalau standar kan jadi acuan. Fokus ke 3 poin atau 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi seluruh proses pembelajaran harus mengacu ketiga

ranah itu. Sikap spiritual, sosial, karakternya seperti apa pengetahuan mencapai atau tidak dan keterampilannya. Jadi, standar kompetensi lulusan untuk saat ini ditekankan pada ketiga hal tersebut. Dan itu berpengaruh ke seluruh kebijakan sekolah. Kita mau buat ini harus mengarah ketiga poin itu. Bagaimana kalau ada kegiatan harus fokus, mau membangun pengetahuan, karakter atau keterampilan”.

SIKK sebagai sekolah induk bagi CLC mengatur penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung. Pada standar kompetensi lulusan dapat dicapai atau berarti sesuai standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa CLC membuat Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang mengacu pada satu kurikulum yang diterapkan di SIKK sebagai sekolah induk. Setiap CLC khususnya di wilayah Sabah, sudah mendapatkan pelatihan untuk membuat KOSP bagi masing-masing CLC.

Standar isi berkaitan dengan jangkauan materi yang digunakan untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Di sisi lain, setiap CLC memiliki tantangan dan karakteristik tersendiri dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala SIKK sebagai berikut.

“Standar isi, proses dan penilaian kan sama akan menentukan SKL yang selama ini yang sudah diterapkan itu sudah berjalan. Harus ada evaluasi, misal dari sisi proses, karena tantangan yang dihadapi oleh masing-masing CLC itu kan berbeda ya. Ada CLC yang mungkin aksesnya dari satu tempat ke tempat lain lebih mudah, ada satu CLC yang aksesnya susah. Tapi apabila saya melihat dari berbagai aspek, artinya saya akan penilaian yang cukup fair. Betul ada masalah-masalah yang ada di CLC. Standar isi kita sudah mengikuti yang ada di nasional, proses juga begitu, penilaian juga mengikutu standar kurikulum yang ada di Indonesia.”.

Lebih lanjut, berlandaskan pada hasil-hasil pengamatan dan studi dokumentasi, CLC, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh SIKK, menerapkan standar kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan menyertakan modifikasi-modifikasi yang diperlukan.

Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran yang dilakukan mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Tidak jauh berbeda, dengan standar isi sebelumnya. Selama berdirinya CLC, standar proses tetap dijalankan memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk menerapkannya secara efektif, penting untuk melakukan evaluasi yang berfokus pada proses, karena berbagai faktor juga berperan dalam memenuhi standar dalam CLC, khususnya berbagai karakteristik yang melekat pada CLC itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh guru CLC sebagaimana diuraikan di bawah ini.

“Proses belajar kita susun di awal semester mengikut sebisa mungkin dengan silabus, kalender pendidikan, prota, prosem. Kita inginnya CLC seperti sekolah di Indonesia tidak jauh berbeda. Supaya nanti kalau anak-anak kalau balik ke Indonesia tidak terlampau jauh perbedaannya.”

Guru di CLC di awal semester membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, kalender pendidikan, program tahunan, program semester. Hal ini memiliki tujuan agar proses pembelajaran di CLC tidak jauh berbeda dengan sekolah di Indonesia pada umumnya. Guru di CLC berupaya untuk memenuhi standar proses yang sudah ditetapkan. Dengan harapan, peserta didik yang nantinya kembali ke Indonesia tidak memiliki tingkat perbedaan yang terlalu tinggi. Diperkuat hasil observasi dan studi dokumentasi, setiap CLC berupaya memenuhi standar proses seperti yang diterapkan di Indonesia. Beberapa arsip dokumen administrasi seperti program tahunan, program semester sampai dengan perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka diupayakan ada. Ditambah dengan

kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kontrol dari SIKK sebagai sekolah induk.

Standar Penilaian Pendidikan berkaitan dengan tolak ukur penting yang mengatur proses untuk mengukur capaian pembelajaran siswa. Menurut temuan penelitian, berbagai mekanisme telah diterapkan oleh para pendidik untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa, sebagaimana diartikulasikan oleh guru CLC dengan cara berikut.

“Tetap memakai formatif dan sumatif. Yang sumatifnya fokus pembelajaran proyek. Yang formatif ke penilaian Tengah semester. Bukan menggunakan paper tes. Yang lain tetap seperti biasa. Sementara dirancang untuk tahun ajaran baru, membuat penilaian portofolio untuk RAB tahun depan. Seluruh kerja peserta didik dimasukkan ke 1 map, dan di akhir tahun dinilai semua. Setiap hasil belajar dia di sekolah, dan dirasa perlu disimpan, itulah yang disimpan. Sudah sempat dijalankan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik”.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, setiap CLC berupaya memenuhi standar penilaian seperti yang ada di Indonesia meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyesuaian.

Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal berupa kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki seorang pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan di luar guru seperti staf tata usaha, staf perpustakaan, penjaga sekolah dan yang lainnya. Keadaan tenaga pendidikan di CLC kurang memadai dimana 1 CLC hanya terdiri dari beberapa guru yang kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai, seperti yang disampaikan oleh Kepala SIKK sebagai berikut

“Tidak memadai. Standar kompetensi lulusan bisa kita capai karena kita mengacu kurikulum yang satu dengan SIKK. Tetapi saya tidak terlalu optimis dengan standarisasi yang lain, seperti ketenaga pendidikan misalnya kan agak susah. Misalnya ada 1 CLC yang memiliki guru bina. Misalnya guru pamong umumnya mereka pekerja yang diberi tugas untuk membantu mengajar, yang dari segi latar pendidikan tidak memadai. Tapi itu source yang kita punya saat ini. Tetapi kalau standarisasi yang bisa kita capai seperti tadi, SKL mungkin kita bisa capai.”

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, bahwa tidak semua CLC memiliki guru yang memadai baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi. Jumlah tenaga pengajar baik guru bina maupun guru bantu belum sejalan dengan jumlah pertumbuhan CLC yang ada. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria penting yang harus disediakan oleh sekolah. Sarana dan prasarana yang ada saat ini berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh Kepala SIKK di bawah ini.

“Tidak memadai”.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, sarana dan prasarana yang ada di CLC belum mampu mewisudahi semua kebutuhan CLC. Di sisi lain, guru tetap dituntut untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Standar Pengelolaan atau pengelolaan berfungsi sebagai persyaratan dasar untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam suatu lembaga pendidikan. Standar pengelolaan di CLC mengikuti arahan dari SIKK sebagai sekolah induk seperti yang disampaikan guru CLC sebagai berikut.

“Pengelolaan, oke, organisasi sekolah berarti ya, ada mulai dari pengelola, tapi di atas ya paling ini ya, Bapak kepala sekolah di SIKK, kemudian ada pengelola, bendahara, dan operator.”

Standar kepengelolaan yang ada mengikuti organisasi yang dibentuk berdasarkan arahan SIKK. Organisasi yang ada dimulai dari kepala sekolah, kemudian pengelola, bendahara sampai dengan operator sekolah. Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan dalam suatu sekolah. Standar pembiayaan di CLC sudah mengikuti standar penerimaan bantuan operasional dari pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan Kepala SIKK sebagai berikut.

“Standar pengelolaan dan pembiayaan mengikuti pendekatan baru. Standar pembiayaan di Direktorat SMP. Pendekatannya akan mengikuti pendekatan BOS yaitu berdasarkan jumlah siswa. Kalau tidak salah di Indonesia satu anak sekitar 1.500.000 di CLC akan sekitar 1.150.000 begitu pula dari Direktorat SD terkait pembiayaan. Artinya dengan pembiayaan yang ada, kita berusaha memenuhi standar pembiayaan itu. Kita dilarang untuk banyak mengeluh. Tapi bagaimana menggunakan resource yang ada untuk mengoptimalkan hasilnya”.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap CLC berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan, dari delapan SNP yang diterapkan di Indonesia, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, dan standar pembiayaan telah sepenuhnya sesuai dengan standar nasional. Saat ini, standar yang terkait dengan proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta manajemen belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan di Indonesia. Namun hal ini bukan berarti CLC tidak berupaya untuk memenuhi 8 standar tersebut.

Selain itu SIKK sebagai sekolah induk tetap melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan proses penyelenggaraan pendidikan di masing-masing CLC. Hal ini dikarenakan, sistem akreditasi tidak dilakukan di CLC melainkan hanya di sekolah induk yaitu SIKK. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala SIKK sebagai berikut.

“Memang kalau saya lihat belum ada ya, belum ada standarisasi di CLC. Kalau mengikuti akreditasi mungkin akan sangat tidak relevan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, daya dukungnya memang untuk mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) tentu tidak akan relevan, misalnya dari segi sarana. Dari sisi ketenagaan dll, tentu tidak relevan memang. Tapi seharusnya memang harus ada standarisasi pun misalnya yang melakukan bukan BSNP tetapi secara internal harus ada standarisasi. Makanya dari divisi CLC kita mendorong untuk ada SOP misalnya. Itu kan ujung-ujungnya kita punya pedoman yang sama yang juga ujungnya juga akan terstandarisasi.”

Kepala SIKK menjelaskan bahwa standarisasi CLC secara internal yang dimaksud adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke masing-masing CLC yang rutin dilaksanakan di akhir tahun. Hal ini sejalan dengan pernyataan guru CLC sebagai berikut.

“Kalau akreditasi, mungkin lebih ke sekolah di SIKK, ya, bu, ya. Tapi kalau kita di CLC itu, biasanya ada Monev, ya. Biasanya kita tiap tahun kan ada Monev”.

Supaya mutu CLC, SIKK tetap melakukan koordinasi dengan CLC. Kemudian dengan adanya monev, masing-masing CLC akan dikunjungi dan dilihat secara keseluruhan. Pelaksanaan monev biasanya dilakukan di penghujung tahun. Di sisi lain, setiap CLC berupaya untuk memenuhi standar pendidikan seperti layaknya proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Karena pemenuhan standar seperti yang

sudah ditetapkan oleh BSNP belum dapat dipenuhi oleh semua CLC dikarenakan setiap CLC memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing.

Hambatan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di CLC

Pelaksanaan 8 SNP tidak dapat dilaksanakan secara baku di *Community Learning Center* (CLC). Hal ini dikarenakan setiap CLC memiliki karakteristik unik sehingga tidak tepat apabila dibuat perbandingan dengan standar yang diterapkan di Indonesia. Sebagaimana diutarakan oleh Kepala SIKK dengan cara berikut.

“Ya, tentu banyak kendala yang kita temui dari sisi administrasi banyak-banyak kendala, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Masing-masing CLC memiliki tantangan dan kendala yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya karena CLC sumber dayanya cukup memadai dari tadi sisi monitoring dan evaluasi cukup bagus tapi juga karena ada CLC yang sumber daya nya terbatas, kemampuan pengelolanya terbatas, sehingga ada upaya dari kita dari SIKK ada upaya pendampingan dari segi monitoring dan evaluasi penilaiannya kurang.”

Hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan sebagian besar dari segi administrasi seperti yang disampaikan oleh Kepala SIKK di atas.

Pelaksanaan Repatriasi

Proses repatriasi telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2024. Repatriasi merupakan jalur bagi para siswa, khususnya mereka yang berlatar belakang PMI yang telah menamatkan pendidikan SMP dan siap melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK, MA, atau lembaga sederajat. Sebagaimana diutarakan oleh guru CLC sebagai berikut.

“Tentu saja, itu wajib maksudnya kami setiap ada pertemuan orang tua itu pasti saya ingatkan kepada orang tua. Kemudian Alhamdulillah yang pertama repatriasi sekarang sudah menjadi mahasiswa semua. Alhamdulillah sehingga itu menjadi cambukan kepada orang tua anak-anak yang masih sekolah sekarang untuk mengirimkan anaknya ikut repatriasi. Alhamdulillah setiap tahun kami mengirimkan anak jadi sekarang ini ada yang di SMA sedang sekolah kemudian ini yang baru lulus ini juga mau berangkat, juga baru pengurusan berkas dan sebagainya yang adem, Alhamdulillah sudah selesai. Jadi setiap tahun ada InsyaAllah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru CLC, ketika ada pertemuan dengan orang tua, akan diingatkan mengenai program repatriasi. Angkatan pertama di CLC yang mengikuti repatriasi sudah ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga hal tersebut menjadi cambukan bagi orang tua dan peserta didik yang masih aktif bersekolah. Sejalan dengan guru CLC, Kepala SIKK menyampaikan terkait pelaksanaan repatriasi sebagai berikut.

“Ya, program ini sudah berjalan cukup lama, sudah 10 tahun. Kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah republik Indonesia dalam hal ini kemendikbudristek dan puslapdik atas upaya-upaya yang dilakukan dalam program repatriasi. Setiap tahun lulusan kita diatas 1000 untuk lulusan SMP. Selama 10 tahun terakhir, lulusan program repatriasi sebanyak 3000. Artinya yang bisa diserap dari wilayah sabah itu sekitar 350. Walaupun ada peningkatan tahun ini, tentu masih jauh dari harapan. Tetapi sekali lagi saya berbicara dari perspektif positif bahwa apa yang dilakukan pemerintah layak kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan, program ini kan semakin menarik bagi calon - calon siswa, terbukti misalnya pendaftaran per tahu kan sekitar hampir 500an untuk pendaftarannya saja. Artinya orang tua kesadaran untuk

melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi semakin bagus. Nah tentu kita akan dorong, mengajukan, mengupayakan penambahan kuota misalnya. Dan saya melihat program repatriasi ADEM ini semakin menarik, yang pertama tentu karena beasiswa, yang kedua siswa akan memiliki berbagai kesempatan untuk melanjutkan beasiswa ADIK ke perguruan tinggi.”

Selaras dengan repatriasi, khususnya melalui ADEM, menjadi lebih menarik karena beragamnya peluang yang dihidirkannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK). Hal ini sejalan dengan pernyataan selanjutnya yang dibuat oleh guru CLC sebagai berikut.

“Dari tahun ke tahun, ada peningkatan dari CLC Sungai Balung sendiri ya ada peningkatan, kalau yang tahun lalu kalau yang sebelumnya mungkin agak kurang yang daftar sampai tahun ini hampir semuanya daftar.”

Peran Program Repatriasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di CLC

Inisiatif repatriasi yang difasilitasi oleh ADEM dan Yayasan, memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan di CLC. Implikasi repatriasi sangat signifikan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana diutarakan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut.

“Dari sosialisasi saya Januari 2024, melihat antusiasme orangtua dan siswa terhadap program ini repatriasi ADEM, sangat relevan dengan peningkatan mutu pendidikan di CLC secara signifikan. Kenapa demikian ? Karena untuk mendapatkan beasiswa repatriasi itu kan tidak mudah. Mereka harus bersaing dengan berbagai CLC yang lain dan yang lebih menarik, panitia tidak hanya melihat dari sisi akademik siswa tetapi juga dari segi non akademik siswa sangat signifikan.”

Kepala SIKK menjelaskan bahwa hasil sosialisasi terkait repatriasi di Januari 2024, antusiasme orangtua dan peserta didik sangat relevan dengan peningkatan mutu pendidikan di CLC. Kepala SIKK memberikan alasan bahwa untuk mendapatkan beasiswa repatriasi dibutuhkan persaingan karena harus melalui seleksi baik dari sisi akademik dan non akademik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan guru CLC berikut.

“Perbaiki-perbaiki, anak-anak yang mau ikut repatriasi, dari kelas 1 dari sikap dan akademisnya belum terlalu baik. Kemudian dapat informasi akan ada repatriasi. Kemudian memotivasi berlomba dengan yang lainnya untuk menunjukkan akademisnya, sikapnya, supaya direkomendasikan oleh gurunya.”

Peserta didik yang berencana mengikuti repatriasi dan belum memiliki sikap dan akademis yang terlalu baik, akan termotivasi. Peserta didik tersebut akan berlomba untuk memperbaiki sikap dan akademisnya kemudian menunjukkan kepada guru agar direkomendasikan. Senada dengan Kepala SIKK dan guru CLC, guru CLC lain menambahkan pernyataan berikut.

“Sangat penting, seperti yang saya sampaikan tadi. Repatriasi menjadi sasaran mereka nanti. Mereka ingin bisa ikut program repatriasi. Jadi pemicu. Secara tidak langsung, membangkitkan minat orang tua untuk bersekolah. Setiap hari banyak yang datang untuk mendaftar. Beberapa bulan terakhir, dari kalabakan datang. Pak saya mau kasih anak, saya dengar dengar lewat CLC bisa daftar. Jadi pemicu program repatriasi membuat anak-anak dan orang tua semakin fokus di CLC. Peranannya secara signifikan.”

Repatriasi menjadi sasaran peserta didik. Secara tidak langsung membangkitkan minat orang tua peserta didik untuk menyelenggarakan anaknya. Repatriasi menjadi pemicu peserta didik dan orang tua untuk semakin fokus bersekolah di CLC. Sejalan dengan pernyataan alumni CLC sebagai berikut.

“Program repatriasi telah memberikan motivasi tambahan bagi siswa. Melihat kakak kelas menerima beasiswa dan mendapatkan peluang lebih baik telah mendorong kami untuk belajar lebih giat dan mencapai prestasi yang lebih baik.”

Repatriasi memberikan motivasi tambahan bagi peserta didik. Melihat kakak kelas yang terlebih dahulu mengikuti program repatriasi dan mendapatkan peluang lebih baik sehingga mencapai prestasi. Alumni yang lainnya juga menyatakan hal sebagai berikut.

“Bisa membantu murid yang kurang mampu dan murid-murid lebih semangat belajar agar bisa mengikuti program repatriasi.”

Program repatriasi mendorong peserta didik untuk lebih semangat belajar. Diperkuat dengan hasil studi dokumentasi bahwa untuk menjadi penerima beasiswa repatriasi harus mengikuti rangkaian seleksi mulai dari tes akademik literasi dan numerasi, tes keagamaan, tes kesehatan, tes minat dan bakat, serta tes psikologi. Selain itu, guru dimana peserta didik berasal akan diwawancarai terkait bagaimana peserta didik di CLC yang akan dijadikan dasar rekomendasi.

Berdasar dari hasil wawancara dan studi dokumentasi program repatriasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di *Community Learning Center* di Sabah, Malaysia. Hal ini meliputi peningkatan motivasi belajar di kalangan siswa, peningkatan kesadaran orang tua tentang pendidikan, peningkatan mutu lulusan CLC, dan penyempurnaan proses layanan pendidikan di CLC.

PEMBAHASAN

Karakteristik *Community Learning Center* (CLC)

CLC berfungsi sebagai pusat untuk mengorkestrasi inisiatif pendidikan di luar negeri, khususnya di wilayah Sabah, Malaysia, yang melayani anak-anak PMI yang tidak dapat mengakses pendidikan formal di lembaga pemerintah atau swasta di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan untuk pembentukan dan pendaftaran Pusat Pembelajaran Masyarakat (CLC) atau *Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti* (CLC) di Sabah, yang menetapkan bahwa:

Pusat Pembelajaran Masyarakat (CLC) berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk menawarkan kesempatan belajar alternatif bagi anak-anak pekerja Indonesia yang tinggal di wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Inisiatif ini menargetkan mereka yang memiliki dokumen yang sah tetapi tidak memiliki akses ke pendidikan formal di lembaga pemerintah atau swasta.

Sejalan dengan temuan penelitian oleh (Loganathan et al., 2023) yang menyatakan bahwa Sabah menampung kelompok non-warga negara akibat migrasi lintas batas antar generasi dengan tetangga seperti Indonesia dan Filipina. Kelompok non-warga negara di Sabah mencakup sepertiga dari populasi di Sabah yaitu sekitar 250.000 yang sebagian besar adalah anak-anak berusia 0-19 tahun. Anak-anak yang beresiko mengalami pengecualian pendidikan formal atau pendidikan Kerajaan negeri Sabah adalah anak-anak

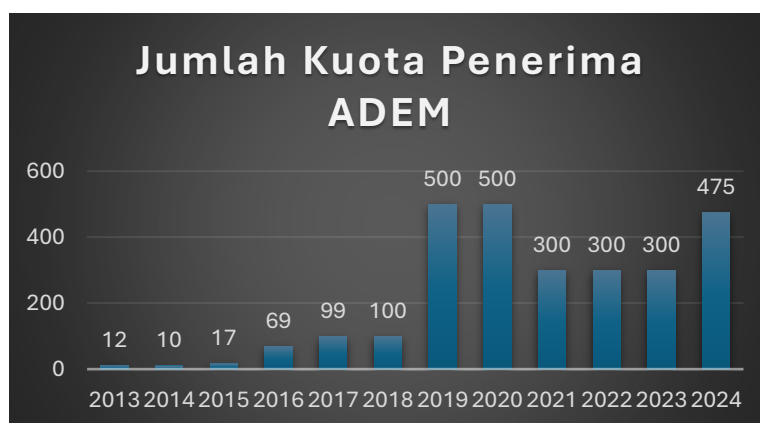
migran dari Indonesia tanpa dokumen izin tinggal, Filipina, Suku Bajau Laut tanpa kewarganegaraan serta Masyarakat adat yang menghadapi hambatan geografis dan masalah dokumen kelahiran.

Pusat pembelajaran komuniti atau CLC dibentuk sebagai bentuk alternatif layanan pendidikan dikarenakan pemerintah Malaysia membatasi pendidikan di sekolah Kerajaan atau sekolah milik pemerintah Malaysia hanya diperuntukkan bagi warga negara Malaysia. Anak Indonesia yang tergolong orangtuanya merupakan ekspatriat boleh bersekolah di sekolah internasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Malaysia tahun 1996. Penemuan ini menyempurnakan karya ilmiah (Lumayag, 2016) yang menegaskan bahwa orang asing tak berdokumen yang tinggal di Malaysia dilarang mendaftar di sekolah pemerintah. Pemerintah Malaysia menetapkan kerangka pengecualian pendidikan yang memengaruhi kelompok atau individu tertentu, khususnya pekerja migran, yang ditolak aksesnya ke pendidikan formal yang disediakan oleh negara. Situasi ini muncul dari masalah yang terkait dengan status kewarganegaraan dan kurangnya dokumentasi imigrasi yang lengkap. Penemuan ini menyempurnakan karya ilmiah (Allerton, 2023), yang menyoroti tantangan yang dihadapi anak-anak pekerja migran di Malaysia terkait pengecualian pendidikan.

Program Repatriasi

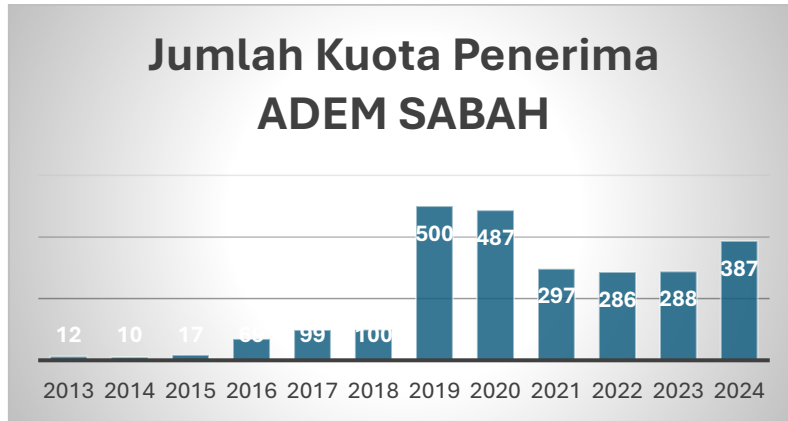
Sejak tahun 2013, dua jalur repatriasi yang berbeda telah ditetapkan dan saat ini sedang berlaku. Jalur repatriasi ADEM dan jalur repatriasi Yayasan. Jalur repatriasi ADEM, yang juga dikenal sebagai afirmasi pendidikan menengah, merupakan inisiatif yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Program ADEM memfasilitasi repatriasi siswa dari *Community Learning Center* (CLC) atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan di Indonesia.

Sekolah SMA/SMK yang menjadi tujuan repatriasi ADEM merupakan sekolah mitra yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Mendekati tahun 2024, program repatriasi ADEM direncanakan akan dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia. Diantaranya adalah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Setiap tahunnya repatriasi jalur ADEM memiliki batasan kuota dalam penerimaan karena menyesuaikan anggaran dari pemerintah Indonesia.



Gambar 1. Grafik Jumlah Kuota Penerima ADEM

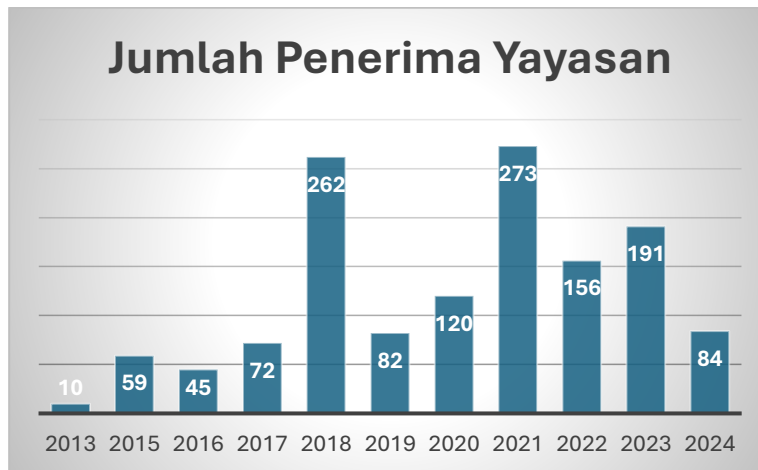
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan sebanyak 2682 anak PMI sudah dipulangkan melalui jalur repatriasi ADEM. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 jalur repatriasi ADEM diberikan kepada anak PMI khususnya di wilayah Malaysia. Kemudian pada tahun 2024, pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada anak PMI yang ada di Arab Saudi untuk turut serta dalam repatriasi ADEM.



Gambar 2. Grafik Jumlah Kuota Penerima ADEM khusus wilayah Sabah, Malaysia

Sementara itu berikut, jumlah penerima ADEM khusus yang berasal dari Sabah, Malaysia. Berdasarkan grafik di atas, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, sebanyak 2552 anak PMI sudah dipulangkan untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia melalui jalur repatriasi ADEM.

Skema jalur repatriasi kedua, merupakan alternatif bagi anak PMI yang tidak dapat mengikuti jalur repatriasi ADEM dikarenakan keterbatasan kuota. Jalur tersebut merupakan jalur repatriasi Yayasan. Jalur repatriasi Yayasan tidak berbeda dengan jalur repatriasi Yayasan melainkan di sumber anggaran. Apabila jalur repatriasi ADEM didanai sepenuhnya oleh Kemendikbudristek, jalur repatriasi Yayasan didanai langsung oleh sekolah mitra ataupun pihak Yayasan dimana sekolah mitra bernaung.



Gambar 3. Grafik Jumlah Kuota Penerima Yayasan khusus wilayah Sabah, Malaysia

Berdasarkan grafik di atas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1354 anak PMI sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat melalui jalur repatriasi Yayasan.

Aspek Mutu Pendidikan di CLC dilihat dari SNP

CLC sebagai layanan pendidikan bagi anak PMI di Sabah, Malaysia khususnya berada di wilayah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain Kemendikbud RI, keberadaan CLC di Sabah berada di wilayah masing-masing kantor perwakilan RI baik KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau. Segala bentuk proses penyelenggaraan pendidikan CLC tidak dapat berdiri secara mandiri melainkan tetap menginduk ke SIKK sebagai Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan berkoordinasi dengan kantor perwakilan RI. Penemuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Sholina, 2022) yang menunjukkan bahwa KRI Tawau bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendirikan Community Learning Center (CLC) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dan mendorong mereka untuk lebih mengutamakan sekolah daripada membantu orang tua bekerja.

Penulis mengambil sudut pandang dari delapan SNP yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan mencakup berbagai unsur, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria penting yang harus dipenuhi oleh siswa untuk mencapai statusnya sebagai lulusan. Temuan penelitian mengenai unsur-unsur standar kompetensi lulusan yang digunakan dalam CLC menunjukkan bahwa standar-standar ini selaras dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, yang mencakup integrasi yang kohesif dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber, pada standar kompetensi lulusan dapat dicapai atau berarti sesuai standar yang sudah ditetapkan. Namun di sisi lain, di standar tenaga kependidikan belum mampu karena keterbatasan. Selain itu, hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa CLC membuat Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang mengacu pada satu kurikulum yang diterapkan di SIKK sebagai sekolah induk. Setiap CLC khususnya di wilayah Sabah, sudah mendapatkan pelatihan untuk membuat KOSP bagi masing-masing CLC.

Aspek standar isi berkaitan dengan jangkauan materi yang digunakan untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Di sisi lain, setiap CLC memiliki tantangan dan karakteristik tersendiri dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber, setiap CLC merujuk ke standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun di lapangan, masing-masing CLC memiliki karakteristik dan tantangan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Terdapat CLC yang mudah dijangkau karena terletak di kawasan non ladang, ada juga CLC yang terletak di kawasan ladang sehingga membutuhkan waktu untuk mengaksesnya. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Loganathan et al., 2022) yang menyatakan bahwa anak-anak pekerja migran Indonesia memiliki akses ke pusat pembelajaran atau Community Learning Center (CLC) yang memiliki standar akademik dan didukung oleh perusahaan sawit serta kantor perwakilan.

CLC telah berupaya untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Suarno et al., 2022) yang menyatakan bahwa CLC telah melakukan berbagai

inisiatif yang patut dipuji untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan anak-anak PMI yang tinggal di daerah perbatasan. Di antara inisiatif tersebut adalah penyusunan kurikulum pendidikan yang selaras dengan standar Indonesia, pengenalan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan anak-anak PMI, dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak PMI yang tinggal di daerah perbatasan. Lebih lanjut, berlandaskan pada hasil-hasil pengamatan dan studi dokumentasi, CLC, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh SIKK, menerapkan standar kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan menyertakan modifikasi-modifikasi yang diperlukan.

Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran yang dilakukan mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber, setiap CLC memiliki keunikan tersendiri disamping tetap berusaha memenuhi standar yang ada. Selama berdirinya CLC, standar proses tetap dijalankan memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk menerapkannya secara efektif, penting untuk melakukan evaluasi yang berfokus pada proses, karena berbagai faktor juga berperan dalam memenuhi standar dalam CLC, khususnya berbagai karakteristik yang melekat pada CLC itu sendiri. Guru di CLC di awal semester membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, kalender pendidikan, program tahunan, program semester. Hal ini memiliki tujuan agar proses pembelajaran di CLC tidak jauh berbeda dengan sekolah di Indonesia pada umumnya. Guru di CLC berupaya untuk memenuhi standar proses yang sudah ditetapkan. Dengan harapan, peserta didik yang nantinya kembali ke Indonesia tidak memiliki tingkat perbedaan yang terlalu tinggi. Diperkuat hasil observasi dan studi dokumentasi, setiap CLC berupaya memenuhi standar proses seperti yang diterapkan di Indonesia. Beberapa arsip dokumen administrasi seperti program tahunan, program semester sampai dengan perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka diupayakan ada. Ditambah dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kontrol dari SIKK sebagai sekolah induk. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Allerton, 2020) yang menyatakan bahwa di pusat-pusat pembelajaran atau CLC guru-guru termotivasi untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mendapatkan pendidikan sampai dengan konteks materi identitas nasional anak-anak pekerja migran.

Komponen mendasar dari evaluasi pendidikan berkaitan dengan tolak ukur penting yang mengatur proses untuk mengukur capaian pembelajaran siswa. Artikulasi kriteria penilaian dalam CLC berkaitan dengan metodologi yang digunakan oleh para pendidik untuk mengevaluasi capaian pembelajaran siswa. Menurut temuan penelitian, berbagai mekanisme telah diterapkan oleh para pendidik untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber, menyatakan bahwa mekanisme penilaian di CLC menggunakan dua yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan dengan fokus pada pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan penilaian formatif ke penilaian tengah semester. walaupun tidak ada akreditasi, standar diupayakan mengikuti standar di Indonesia. Hal ini dikarenakan peserta didik akan melanjutkan pendidikan ke Indonesia melalui repatriasi. Sehingga peserta didik tidak terlalu terkejut bahwa sekolah yang ada di Sabah, Malaysia tidak jauh berbeda

dengan sekolah yang ada di Indonesia. Kemungkinan akan ada yang kurang tetapi peserta didik akan paham karena keterbatasan guru di CLC. Diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, setiap CLC berupaya memenuhi standar penilaian seperti yang ada di Indonesia meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyesuaian.

Aspek standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal berupa kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki seorang pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan di luar guru seperti staf tata usaha, staf perpustakaan, penjaga sekolah dan yang lainnya. Keadaan tenaga pendidikan di CLC kurang memadai dimana 1 CLC hanya terdiri dari beberapa guru yang kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa dalam 1 CLC, terdapat guru bina dan guru pamong. Meskipun demikian, guru pamong berperan sebagai praktisi di lapangan, yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran, namun mereka sering tidak sejalan dengan kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan yang ditetapkan oleh standar. Penemuan ini menyempurnakan karya (Loganathan et al., 2023), yang menunjukkan bahwa inisiatif pendidikan untuk masyarakat non-warga negara, khususnya di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menarik pendidik lokal yang berkualifikasi melalui Pusat Pembelajaran Masyarakat (CLC). Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, bahwa tidak semua CLC memiliki guru yang memadai baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi. Jumlah tenaga pengajar baik guru bina maupun guru bantu belum sejalan dengan jumlah pertumbuhan CLC yang ada.

Unsur-unsur mendasar sarana dan prasarana merupakan kriteria penting yang harus disediakan oleh sekolah. Sarana dan prasarana yang ada saat ini berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi, sarana dan prasarana yang ada di CLC belum mampu mewadahi semua kebutuhan CLC. Di sisi lain, guru tetap dituntut untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Komponen manajemen fundamental atau pengelolaan berfungsi sebagai persyaratan dasar untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam suatu lembaga pendidikan. Standar pengelolaan di CLC mengikuti arahan dari SIKK sebagai sekolah induk. Dari hasil wawancara ke beberapa narasumber menyatakan bahwa di CLC, terdapat organisasi yang dibuat dengan posisi di atas adalah kepala perwakilan dengan SIKK kemudian dibawahnya ada ALP atau ahli lembaga pengelola. ALP adalah bagian dari syarikat atau perusahaan yang bertanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan CLC. Setelah itu baru turun ke pengelola dan wali kelas. Di dalam struktur kepengelolaan CLC, terdapat peran dari syarikat atau perusahaan sawit dalam struktur organisasi tersebut dalam bentuk Ahli Lembaga Pengelola (ALP). Hal ini memperkaya guru CLC untuk berkoordinasi dengan syarikat. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Duraisingam et al., 2024), yang menyatakan bahwa syarikat perkebunan sawit yang mendirikan sekolah memiliki dampak positif pada kehidupan anak-anak yang tinggal di Perkebunan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi dan studi dokumentasi bahwa kepengelolaan di CLC tidak hanya

melibatkan sekolah, orang tua dan masyarakat melainkan juga pihak syarikat dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan CLC.

Aspek standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan dalam suat sekolah. Standar pembiayaan di CLC sudah mengikuti standar penerimaan bantuan operasional dari pemerintah Indonesia. Dana bantuan operasional pemerintahnya, pelaporan dibuat sesuai standar terarsip, dan terdapat aplikasi terkait pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap Pusat Pembelajaran Masyarakat berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan, dari delapan SNP yang diterapkan di Indonesia, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, dan standar pembiayaan telah sepenuhnya sesuai dengan standar nasional. Saat ini, standar yang terkait dengan proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta manajemen belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan di Indonesia. Namun hal ini bukan berarti CLC tidak berupaya untuk memenuhi 8 standar tersebut.

Selain itu SIKK sebagai sekolah induk tetap melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan proses penyelenggaraan pendidikan di masing-masing CLC. Hal ini dikarenakan, sistem akreditasi tidak dilakukan di CLC melainkan hanya di sekolah induk yaitu SIKK. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengawasan terangkum dalam kegiatan standarisasi yang dilakukan secara internal. Standarisasi CLC secara internal yang dimaksud adalah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke masing-masing CLC yang rutin dilaksanakan di akhir tahun. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan (Haq et al., 2024), yang menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan, monitoring dan evaluasi (monev) memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan standar lembaga pendidikan. Pada kegiatan monitoring terdapat teknis pengumpulan data untuk menilai kemajuan program sekolah yang sudah direncanakan, memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi potensi hambatan serta implementasinya. Sementara itu, evaluasi secara sistematis menilai efektivitas kebijakan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan suatu program sekolah.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di CLC, SIKK berupaya memberikan program pelatihan bagi guru CLC. Penemuan ini menyempurnakan karya (Trubavina & Martyniuk, 2020), yang menegaskan bahwa inisiatif pelatihan bagi para pendidik dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran. Hal ini akan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Selain itu hasil dokumentasi menunjukkan SIKK sebagai sekolah induk secara rutin mengadakan pelatihan kepada guru CLC, baik itu guru bina maupun guru pamong. Meskipun kendalanya adalah keterbatasan anggaran sehingga jumlah peserta yang mengikuti dibatasi. Selain itu, guru-guru bergantian setiap tahunnya untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan.

Hambatan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di CLC

Pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan di CLC merupakan proses yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan atribut unik masing-masing CLC. Tidak mungkin memaksakan penerapan SNP secara ketat di berbagai CLC, karena masing-masing CLC memiliki karakteristik unik yang membuat perbandingan langsung tidak tepat. Lebih jauh, dengan dukungan SIKK, CLC tetap berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terstandarisasi. Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa kendala peningkatan mutu pendidikan terutama yang sering ditemui dari segi administrasi. Masing-masing CLC memiliki tantangan dan kendala yang berbeda. Seperti misalnya CLC yang memiliki sumber daya yang cukup memadai maka ketika monitoring dan evaluasi memiliki penilaian yang baik. Berbanding terbalik dengan CLC yang sumber dayanya terbatas sehingga memiliki penilaian yang kurang. CLC yang memiliki penilaian kurang akan ada pendampingan dari SIKK. Seperti misalnya sumber daya guru, setiap CLC tidak selalu memiliki guru bina dan guru pamong yang sebanding dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik. Akibatnya guru di CLC sebagian besar melakukan pembelajaran rangkap.

Penemuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia Christie, 2016) yang mengidentifikasi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Sabah. Secara khusus, penelitian ini menyoroti kurangnya keselarasan antara pertumbuhan pusat kegiatan belajar dan ketersediaan pendidik, serta rasio siswa terhadap staf pengajar yang tidak proporsional di setiap pusat.

Pelaksanaan Repatriasi

Proses repatriasi telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2024. Repatriasi merupakan jalur bagi para siswa, khususnya mereka yang berlatar belakang PMI yang telah menamatkan pendidikan SMP dan siap melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK, MA, atau lembaga sederajat. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber mengungkapkan bahwa setiap ada pertemuan dengan orang tua, akan diingatkan mengenai program repatriasi. Angkatan pertama di CLC yang mengikuti repatriasi sudah ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga hal tersebut menjadi cambukan bagi orang tua dan peserta didik yang masih aktif bersekolah. Penemuan ini memperkuat kajian yang disajikan oleh (Darwis & Baharuddin, 2021), yang mengartikulasikan upaya kolaboratif antara Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Inisiatif utama meliputi pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), pembentukan *Community Learning Center* (CLC), penempatan pendidik Indonesia ke Sabah sebagai bagian dari inisiatif repatriasi, dan penyediaan dokumentasi resmi penting seperti Paspor, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah. Program repatriasi sudah berjalan sekitar 10 tahun. Khususnya ADEM yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek melalui Puslapdik. Setiap tahunnya, potensi lulusan CLC jenjang SMP di atas 1000. 10 tahun terakhir sudah sekitar 3000 anak melaksanakan repatriasi. Repatriasi juga menarik bagi calon-calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan dilihat dari animo pendaftar sampai dengan 500 peserta. Selaras dengan repatriasi, khususnya melalui ADEM, menjadi lebih menarik karena beragamnya peluang yang dihidirkannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi melalui program Afirmasi

Pendidikan Tinggi (ADIK). Contoh langsung yang diberikan menjadi cambukan tersendiri bagi peserta didik yang masih berada di jenjang SMP. Peserta didik menjadi lebih antusias mengikuti perlombaan agar nantinya mendapatkan sertifikat yang menjadi persyaratan dalam pendaftaran repatriasi. Repatriasi menjadi salah satu alternatif upaya keberlanjutan pendidikan bagi anak PMI. Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi penerima repatriasi. Hal ini dikarenakan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Warsono et al., 2018) yang menyatakan bahwa khususnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara memberikan layanan pendidikan bagi anak PMI. Beberapa bantuan dari perusahaan Pertamina, Yayasan Dompot Dhuafa dan relawan bersedia menjadi tenaga pengajar untuk keberlangsung sekolah tersebut.

Repatriasi tidak hanya sebatas memulangkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat di Indonesia. Hal dikarenakan peserta repatriasi merupakan anak pekerja migran Indonesia yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Peserta didik tersebut mungkin belum pernah pulang ke Indonesia. Sehingga pada awal masa peserta didik sampai di Indonesia diawali dengan penyesuaian diri.

Peran Program Repatriasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di CLC

Inisiatif repatriasi yang difasilitasi oleh ADEM dan Yayasan, memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan di CLC. Implikasi repatriasi sangat signifikan. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa narasumber mengungkapkan bahwa program repatriasi mendorong peserta didik untuk lebih semangat belajar. Diperkuat dengan hasil studi dokumentasi bahwa untuk menjadi penerima beasiswa repatriasi harus mengikuti rangkaian seleksi mulai dari tes akademik literasi dan numerasi, tes keagamaan, tes kesehatan, tes minat dan bakat, serta tes psikologi. Selain itu, guru dimana peserta didik berasal akan diwawancarai terkait bagaimana peserta didik di CLC yang akan dijadikan dasar rekomendasi. Temuan dan pembahasan yang disajikan menunjukkan bahwa program repatriasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di *Community Learning Center* di Sabah, Malaysia. Hal ini meliputi peningkatan motivasi belajar di kalangan siswa, peningkatan kesadaran orang tua tentang pendidikan, peningkatan mutu lulusan CLC, dan penyempurnaan proses layanan pendidikan di CLC.

Peserta didik yang berencana mengikuti program repatriasi baik melalui jalur ADEM dan jalur Yayasan berusaha untuk memperbaiki kualitas baik secara akademik dan non akademik. Setelah mendengar informasi mengenai pelaksanaan program repatriasi peserta didik mempersiapkan diri. Menjelang tahun akhir ujian atau sudah memasuki kelas 9, peserta didik mulai fokus dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/MA sederajat.

Di samping itu, contoh langsung dari kakak kelas atau alumni CLC yang sudah mengikuti program repatriasi menjadi cambukan motivasi. Kegiatan sharing alumni yang biasa dilakukan baik secara daring maupun luring menambah motivasi belajar peserta didik

Pemikiran peserta didik setelah lulus dari CLC jenjang SMP untuk menjadi pekerja di Sabah khususnya ataupun menikah dini secara tidak langsung akan berkurang. Ditambah dengan kondisi peserta

didik selama ini sebagian besar tidak memiliki dokumen izin tinggal. Repatriasi menjadi jalan keluar untuk melegalkan keberadaan awal yang illegal. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Lasimbang et al., 2016) yang menyatakan bahwa kelompok pekerja migran perempuan dan migran tanpa dokumen menjadi subkelompok yang rentan. Selama ini, pemerintah Malaysia cenderung memberikan toleransi kepada peserta didik yang belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dan masih bersekolah di SIKK maupun CLC. Selama masih dalam usia pelajar, pemerintah Malaysia terbatas akan kesepakatan antar pemerintah dan menghindari isu pelanggaran HAM.

Usia peserta didik jenjang SMP rata-rata berusia 12-15 tahun, orang tua memiliki peranan penting dalam proses pendidikan terutama berkaitan dengan izin. Ketika peserta didik mengikuti program repatriasi, orang tua akan dihadapkan pada posisi harus tinggal jauh dengan anaknya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan tujuan awal membawa anak ikut menemani bekerja di Sabah agar tetap mendampingi.

Namun, seiring berjalan waktu, orang tua melihat secara langsung bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di CLC dan bagaimana program repatriasi berjalan. Ditambah lagi, bukti nyata dari alumni CLC yang tidak hanya terhenti di jenjang SMA/SMK/MA sederajat melainkan melanjutkan ke perguruan tinggi kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang tua kemudian sadar dan mulai mengizinkan anaknya mengikuti program repatriasi. Cerita dari orang tua satu ke orang tua lain, terutama orang tua yang sudah berhasil menambah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Woodman, 2017) yang menyatakan bahwa keluarga pekerja migran khususnya orang tua berupaya memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang memungkinkan kemudahan akses untuk mendapatkan pekerjaan dan manfaat baik lainnya.

Orang tua pekerja migran mulai memiliki tujuan tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga memastikan pendidikan anak-anak dapat terpenuhi. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Wahab, 2023) yang menyatakan bahwa ketika Pandemi Covid 2019 di Sabah, Malaysia Timur pekerja migran menghadapi situasi ketidakpastian. Langkah-langkah pembatasan pergerakan dimanfaatkan oleh perusahaan kelapa sawit yang berdampak buruk pada pekerja migran. Pengusaha menggunakan alasan bisnis dan pembatasan pergerakan untuk mengendalikan pekerja dan membatasi hak-hak pekerja migran. Pengalaman ini membuat pekerja migran yang memiliki status sebagai orang tua dan memiliki anak di usia sekolah berpikir ke depan.

Di sisi lain dominasi pekerja migran di Sabah membuat kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Sabah khususnya. Ketergantungan yang berlebihan pada pekerja migran memiliki dampak untuk melemahkan kebijakan pemerintah dari masalah ekonomi berbasis tenaga kerja intensif menuju otomasi dalam rangka mencapai status negara maju. Oleh karena itu, Malaysia mulai membatasi dan membuat pengawasan ketat terhadap kedatangan pekerja migran. Temuan ini memperkaya penelitian yang dilakukan oleh (Dollah & Abdullah, 2018) yang menyatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan sektor ekonomi pada tenaga kerja asing, khususnya pekerja illegal, sebagai ancaman keamanan yang perlu diberantas. Sehingga, pekerja migran Indonesia mulai harus berpikir ke depan untuk tidak bergantung di sektor ekonomi perkebunan sawit di Malaysia khususnya Sabah.

Sebelum adanya repatriasi, sebagian besar lulusan CLC akan kembali ke ladang atau bekerja serabutan atau menikah atau membantu orang tua bekerja. Lulusan CLC yang kemudian melanjutkan ke Indonesia akan menjalani proses pembelajaran yang mungkin akan berbeda dibandingkan ketika belajar di CLC. Di CLC, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran dari 2-3 guru atau bahkan hanya 1 guru, di Indonesia peserta didik CLC akan didampingi proses pembelajaran dengan guru yang berbeda di masing-masing mata pelajaran. Sarana dan prasarana di sebagian besar CLC masih terbatas atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, berbeda dengan sekolah di Indonesia yang sebagian sarana dan prasaranya sudah memadai. Informasi di atas, akan secara mudah didapatkan oleh peserta didik yang masih aktif di CLC melalui jejaring alumni. Hal ini menjadi cambukan tersendiri bagi peserta didik yang sementara akan berproses melalui repatriasi untuk terus meningkatkan kualitas diri peserta didik sehingga meningkatkan mutu lulusan CLC. Penemuan ini menyempurnakan karya Ratna Siwi Widayanti dan rekan-rekannya (2021) yang menunjukkan bahwa hasil program ADEM meliputi siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur ADIK, serta prestasi akademik dan non-akademik peserta ADEM.

Pemenuhan delapan SNP di CLC belum dapat dipenuhi secara keseluruhan. Untuk mengetahui apakah proses layanan pendidikan di CLC berjalan atau tidak SIKK sebagai sekolah memiliki mekanisme internal yang disebut monev. Dari kunjungan monev tersebut akan terkumpul informasi terkait bagaimana layanan pendidikan di CLC. Dengan adanya repatriasi secara tidak langsung guru akan berusaha menciptakan layanan pendidikan terbaik agar peserta didik mampu bersaing ketika proses seleksi. Hal ini terus diupayakan mengingat guru senantiasa mengikuti perkembangan alumni yang sudah mengikuti repatriasi. Guru akan mempersiapkan agar peserta didik yang sementara dalam proses menuju repatriasi untuk memiliki bekal yang cukup untuk mengikuti proses pembelajaran di SMA/SMK/MA sederajat di Indonesia. Repatriasi memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pendidikan anak pekerja migran Indonesia. Anak-anak PMI tidak terbelenggu dengan status sebagai PMI dan kekhawatiran tidak mendapatkan akses pendidikan karena keadaan mengikuti orang tua yang bekerja sebagai PMI di Sabah khususnya. Mencapai kesetaraan bagi anak-anak PMI akan menjadi tujuan yang lebih dapat dicapai. Penemuan ini menyempurnakan karya ilmiah (Fitriyah et al., 2024), yang menyoroti bahwa keturunan buruh migran termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh kualitas hidup yang lebih adil. Berdasarkan temuan dari wawancara, beserta analisis data observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa program repatriasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di CLC. Hal ini terbukti melalui peningkatan motivasi di kalangan siswa, meningkatnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, dan peningkatan menyeluruh baik dalam kualitas CLC maupun proses layanan pendidikan yang ditawarkannya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan, Malaysia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Setiap CLC berupaya memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar manajemen, dan standar pembiayaan. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi delapan SNP yang ditetapkan sebagai standar maksimal, SIKK sebagai lembaga induk melaksanakan pengawasan internal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan pada akhir setiap tahun ajaran. Kegiatan monev dilakukan untuk melihat bagaimana layanan pendidikan di CLC dan mengecek beberapa aspek seperti kurikulum, kepegawaian, kelembagaan, kesiswaan, kehumasan, keuangan dan sarana prasarana. Hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan di CLC sebagian besar dari segi administrasi. Masing-masing CLC memiliki tantangan dan kendala yang berbeda, karena karakteristik setiap CLC berbeda. Repatriasi merupakan kegiatan pemulangan kembali warga negara ke negara asalnya. Repatriasi yang dimaksudkan disini adalah repatriasi melalui jalur pendidikan yang terbagi atas dua jalur, yaitu repatriasi ADEM dan repatriasi Yayasan. Repatriasi ADEM merupakan jalur untuk melanjutkan ke pendidikan SMA/SMK/MA sederajat di Indonesia dengan anggaran sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek RI. Sedangkan repatriasi jalur Yayasan jalur untuk melanjutkan pendidikan SMA/SMK/MA sederajat di Indonesia dengan anggaran berasal dari sekolah mitra atau pihak Yayasan. Program repatriasi berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di CLC dengan menumbuhkan motivasi siswa yang lebih besar, meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan, meningkatkan mutu lulusan CLC, dan menyempurnakan proses layanan pendidikan secara keseluruhan di CLC.

SARAN

Penyelenggaraan layanan pendidikan kepada anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia melalui *Community Learning Center* (CLC) selama lebih dari 10 tahun harus mulai menitikberatkan pada mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan dan dihasilkan. Walaupun untuk penerapan delapan standar nasional pendidikan terkesan memaksa keadaan, dikarenakan karakteristik CLC yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, dari 8 SNP yang diterapkan di Indonesia, standar kompetensi lulusan, isi, penilaian, dan pembiayaan telah sepenuhnya disesuaikan dengan standar nasional. Saat ini, standar yang berkaitan dengan proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta manajemen belum sepenuhnya disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk mencapai standar yang belum terpenuhi. Program repatriasi memiliki dampak positif bagi keberlanjutan pendidikan anak pekerja migran. Namun, hal ini dikhawatirkan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua yang sebelumnya sudah menyekolahkan anaknya di kampung (di Indonesia) kemudian membawa anak merantau ke Sabah dengan jalur ilegal dengan tujuan repatriasi. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat skema atau penjarangan repatriasi melihat kondisi tersebut. Perlu adanya penyesuaian jumlah tenaga pengajar dengan penumbuhan CLC baik di ladang ataupun nonladang. Hal ini dikarenakan penumbuhan atau pendirian CLC sampai sejauh ini tidak diimbangi dengan penambahan guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Osman, H., Raflis, A., Omar, C., Rahman, M. R., & Ishak, S. (2020). Contributions and Challenges of Palm Oil to Smallholders in Malaysia. 9(06). www.ijstr.org
- Allerton, C. (2018). Impossible children: illegality and excluded belonging among children of migrants in Sabah, East Malaysia. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(7), 1081–1097. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1357464>
- Allerton, C. (2020). Invisible children? Non-recognition, humanitarian blindness and other forms of ignorance in Sabah, Malaysia. *Critique of Anthropology*, 40(4), 455–470. <https://doi.org/10.1177/0308275X20959435>
- Allerton, C. (2023). Discordant temporalities of migration and childhood ★. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 29(4), 763–783. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.14003>
- Anastasia Christie, D. (2016). UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI PENDIDIKAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI SABAH MALAYSIA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(4), 1161–1176. <http://www.antaraki.com>
- Badan Pelindungan Pekerja Migra Indonesia (BP2MI). (2019). "Oleh-Oleh" Kunjungan Ka BNP2TKI Ke Tarakan dan Nunukan. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/oleh-oleh-kunjungan-ka-bnp2tki-ke-tarakan-dan-nunukan#>. Terbit 19 Mei 2019.
- Badan Pelindungan Pekerja Migra Indonesia (BP2MI). (2023). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Agustus 2023. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-09-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Agustus_2023_merged.pdf.
- Darwis, A., & Baharuddin, A. (2021). Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah. In Hasanuddin *Journal of International Affairs* (Vol. 1, Issue 2). Online.
- Dollah, R., & Abdullah, K. (2018). The Securitization of Migrant Workers in Sabah, Malaysia. *Journal of International Migration and Integration*, 19(3), 717–735. <https://doi.org/10.1007/s12134-018-0566-0>
- Dollah, R., Maraining, A., Jafar, A., Joko, E. P., & Sakke, N. (2024). Exploring the Interdependence Model in Malaysia-Indonesia Relations: Insights from Sabah, Malaysia. *Intellectual Discourse*, 32(1). <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.1943>
- Duraisingam, T. J., Veerakumaran, B., Arumugam, M., Muniandy, S., & Rafique, R. B. (2024). Right to education for children of Indonesian migrant workers living in plantations in Sabah – understanding the gaps. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 20(3), 459–475. <https://doi.org/10.1108/IJMHS-01-2024-0001>
- Fitriyah, F. K., Hidayat, M. T., Shalihati, U., Lutfauziah, A., Algristian, H., Machmudah, Afridah, W., Romdloni, M. A., Syaikhon, M., & Susanto, R. U. (2024). Indonesian Students' Mental Health in

- Taiwan: A Comparison of School-Age Students' and Indonesian Migrant Workers' Mental Health. *South Eastern European Journal of Public Health*, 368–373. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.714>
- Haq, M. D., Anggraeni, L., Zein, A. S., Petrovic, N., & Indhirawati, R. (2024). A RAD-Based Approach to eMonevCLC for Monitoring and Evaluation in Community Learning Center. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 51(1), 70–84. <https://doi.org/10.37934/araset.51.1.7084>
- Laporan Divisi CLC Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Bulan Maret Tahun 2024.
- Lasimbang, H. B., Tong, W. T., & Low, W. Y. (2016). Migrant workers in Sabah, East Malaysia: The importance of legislation and policy to uphold equity on sexual and reproductive health and rights. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 32, 113–123. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2015.08.015>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2022). Undocumented: An examination of legal identity and education provision for children in Malaysia. *PLoS ONE*, 17(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404>
- Loganathan, T., Ong, Z. L., Hassan, F., Chan, Z. X., & Majid, H. A. (2023). Barriers and facilitators to education access for marginalised non-citizen children in Malaysia: A qualitative study. *PLoS ONE*, 18(6 June). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286793>
- Lumayag, L. A. (2016). A Question of Access: Education Needs of Undocumented Children in Malaysia. *Asian Studies Review*, 40(2), 192–210. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1158238>
- Peters, D., Omar, M. A., Dollah, R., & Wan Hassan, W. S. (2022). Undocumented Workers during Malaysia's Movement Control Order (MCO). *Migration Letters*, 19(2), 107–121. <https://doi.org/10.33182/ml.v19i2.1280>
- Saefudin, A., Jumintono, & Rejokiriono. (2024). NATIONAL IDENTITY IN TRANSNATIONAL Salinan Kementerian Pelajaran Malaysia tentang Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah.
- Salinan Standar Pelayanan Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2024.
- Schulz, Y. (2017). The great value of poor migrants. *South East Asia Research*, 25(3), 301–318. <https://doi.org/10.1177/0967828X17709365>
- Sholina, C. A. (2022). PEMENUHAN HAK-HAK ASASI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PERKEBUNAN SAWIT DI WILAYAH TAWAU, SABAH, MALAYSIA. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Siwi Widayanti, R. (2021). Manajemen Program Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4(2). <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp>
- Suarno, D. T., Suryono, Y., Zamroni, Irmansyah, J., & Yasin, F. (2022). The meaning and experience on nationalism among Indonesian migrant workers' children in border area. *International Journal of*

Evaluation and Research in Education, 11(3), 1595–1606.

<https://doi.org/10.11591/ijere.v11i3.21729>

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : ALFABETA.

Trubavina, I., & Martyniuk, A. (2020). The content of training program for the teaching staff working with children of the labour migrants (in the context of sustainable futures). *E3S Web of Conferences*, 166. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610001>

Wahab, A. (2023). COVID-19 and the precarity of Indonesian workers in the oil palm production in Sabah, East Malaysia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 32(3), 475–497.

<https://doi.org/10.1177/01171968231206382>

Warsono, H., Nurcahyanto, H. *, & Khaerani, T. R. (2018). Social Movement at Indonesia-Malaysia Border (A Case Study of Indonesian Migrant Workers' Education in Sebatik Island, a Land Border of Indonesia-Malaysia). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873>

Woodman, S. (2017). Legitimizing exclusion and inclusion: 'culture', education and entitlement to local urban citizenship in Tianjin and Lanzhou. *Citizenship Studies*, 21(7), 755–772.

<https://doi.org/10.1080/13621025.2017.1353739>